

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan kemiskinan merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak zaman purbakala. Kemiskinan selalu menjadi persoalan besar yang begitu menakutkan bagi umat manusia. Gambaran kondisi masyarakat miskin di Indonesia sering menimbulkan perasaan miris dan merupakan sebuah fenomena dan masalah sosial yang sangat perlu mendapatkan perhatian dan penanggulangan khusus. Berbagai teori, konsep dan pendekatan terus menerus dikembangkan untuk mengungkapkan, mengetahui misteri kemiskinan dan menentukan strategi penanggulangan kemiskinan. Bank Dunia dan BPS dalam Suharto (2006:134) mendefinisikan kemiskinan sebagai berikut : Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty treshold*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang perhari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.

Kemiskinan merupakan suatu gambaran keadaan individu, keluarga atau sekelompok masyarakat yang mengalami kekurangan baik secara material dari segi ekonomi, politik, kekuasaan maupun aspek mengakses sumber-sumber yang

dibutuhkan untuk kesejahteraan bagi diri, keluarga dan kelompok masyarakat dalam suatu wilayah daerah tertentu. Sampai saat ini banyak para ahli melakukan pengkajian dan penelitian tentang kemiskinan dengan segala macam upaya untuk mengangkat taraf kehidupan yang lebih sejahtera bagi komunitas tersebut.

Menurut Tensey dan Ziegley dalam Tim penelitian Kemiskinan dan keberfungsian sosial (2003:8) mengungkapkan bahwa kemiskinan mempunyai tiga penyebab prinsip yaitu (a) *human capital deficiencies*, defisiensi modal manusia berarti rendahnya kualitas sumberdaya manusia, seperti rendahnya pengetahuan dan keterampilan sehingga menyebabkan mendapatkan pekerjaan yang rendah pendapatannya dan rendahnya daya beli; (b) *insufficient demand for labor*, yakni rendahnya permintaan akan tenaga kerja sehingga meningkatkan pengangguran, pengangguran menyebabkan orang tidak memiliki kebutuhan dasar, dan (c) *discrimination*, adanya perlakuan berbeda terhadap golongan tertentu terutama dalam aksesibilitas terhadap sumberdaya-sumberdaya dan adanya dominasi pihak tertentu terhadap sumberdaya tersebut.

Menurut Suyanto dan Karnaji (2005:7) akar penyebab masalah kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua kategori. *Pertama*, kemiskinan alamiah, yakni kemiskinan yang timbul sebagai akibat sumber-sumber daya yang langka jumlahnya dan atau karena tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah. Artinya faktor-faktor yang menyebabkan suatu masyarakat menjadi miskin adalah secara alami memang ada, dan bukan karena adanya kelompok atau individu di dalam masyarakat tersebut yang lebih miskin dari yang lain. Mungkin saja dalam keadaan kemiskinan alamiah tersebut akan terdapat perbedaan-perbedaan

kekayaan, tetapi dampak perbedaan tersebut akan memperlunak atau dieliminasi oleh adanya pranata-pranata tradisional, seperti pola hubungan *patron client*, jiwa gotong royong, dan sejenisnya fungsional untuk meredam kemungkinan timbulnya kecemburuan sosial.

Banyak upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kemiskinan. Salah satunya adalah meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Upaya ini dapat dilakukan dengan pendekatan kelembagaan masyarakat dan penyediaan dana untuk masyarakat miskin.

Melalui pendekatan kelembagaan masyarakat dan penyediaan dana bantuan langsung ke masyarakat kelurahan sasaran, P2KP cukup mampu mendorong dan memperkuat partisipasi serta kepedulian masyarakat setempat secara terorganisasi dalam penanggulangan kemiskinan. Artinya, Program penanggulangan kemiskinan berpotensi sebagai “gerakan masyarakat”, yakni: dari, oleh dan untuk masyarakat.

Beberapa fakta yang ada dalam upaya pengentasan kemiskinan antara lain adalah: Sebagian mengatakan bahwa proyek kemiskinan harus diperuntukkan bagi kaum miskin sendiri. Tapi di sisi lain banyak program pengentasan kemiskinan yang gagal karena tidak mendapatkan dukungan dari komponen masyarakat lainnya. Antusiasme pemerintah untuk menangani masalah kemiskinan juga terbentur kenyataan bahwa mereka umumnya *inarticulate* secara politik, Sebagian besar penduduk miskin tinggal didesa-desa yang terpencil atau perkampungan kumuh perkotaan sehingga tidak terlihat oleh elit pemerintah. lebih jauh mereka terorganisir dengan baik sehingga tidak mampu

menyatakan pandangan dengan jelas kepada pemerintah. Perpecahan di antara mereka serta tidak adanya juru bicara yang dikenal dan dipercaya umum lebih lanjut memperlemah kepentingan mereka secara politik.

Salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan adalah adanya Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). P2KP adalah suatu prakarsa baru Pemerintah Indonesia untuk menanggulangi persoalan kemiskinan di perkotaan. Proyek ini dirancang dengan pengertian, untuk menanggulangi kemiskinan secara berlanjut, upaya-upaya yang paling penting harus dilakukan oleh komunitas sendiri, terutama pada tingkat kelurahan.

Kelurahan Cigadung adalah salah satu kelurahan di Kota Bandung yang juga mempunyai penduduk miskin. Kemiskinan yang terjadi di kelurahan Cigadung bukan hal yang berdiri sendiri, tetapi merupakan dampak suatu proses pembangunan berencana dan proses-proses perubahan sosial yang terjadi pada waktu lalu hingga waktu sekarang. Pembangunan pada masa Orde Baru, orientasi pembangunan masih terpusat hal ini terlihat pada keputusan pemerintah untuk meluncurkan suatu program sesuai dengan keinginan pusat dengan istilah program pembangunan top down. Program pembangunan seperti itu telah banyak dilakukan dan tidak sesuai dengan keinginan maupun kebutuhan serta permasalahan masyarakat setempat. Demikian halnya pada era otonomi daerah, yaitu suatu keadaan setelah era orde baru, yang dikenal dengan istilah era reformasi, orientasi pembangunan telah berubah kepada partisipasi masyarakat tujuannya bahwa masyarakat diikutsertakan dalam proses pembangunan sehingga akan lebih mengena dan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Walaupun

demikian sampai sekarang masih banyak ditemui warga Kelurahan Cigadung yang hidup miskin.

Kemiskinan berdampak pada berbagai aspek kehidupan meliputi pengangguran, putus sekolah, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, terjadinya perkawinan pada usia dini, kekurangan modal, rendah pendapatan individu maupun keluarga dan jenis pekerjaan yang dimiliki sebagai pekerja kasar seperti buruh, kuli dan lain sebagainya. Gambaran pada tingkat pendidikan Kepala Keluarga (KK) di kelurahan Cigadung berdasarkan sumber kantor kelurahan Cigadung 2010 bahwa ada sejumlah 654 KK yang tidak tamat sekolah dasar, sedangkan KK yang tamat sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) berjumlah 867 orang. Rendahnya tingkat pendidikan ini akan berpengaruh pada lapangan pekerjaan para KK, dengan jenis pekerjaan yang kasar seperti buruh/kuli, tukang ojek dan sebagainya tentunya berdampak pada tingkat pendapatan atau penghasilan yang akan diperoleh.

Pemasalahan lain dari kemiskinan juga berdampak pada kualitas sumberdaya manusia (SDM). Rendahnya sumberdaya manusia ini tentunya akan mengakibatkan terbatasnya lapangan pekerjaan, dengan keterbatasan ini maka angka angkatan kerja yang belum memiliki pekerjaan (pengangguran) semakin lama akan meningkat apabila hal tersebut tidak cepat untuk ditangani oleh berbagai pihak. Berdasarkan sumber kantor Kelurahan Cigadung 2010 tingkat pengangguran atau angka usia produktif yang belum dan tidak bekerja di lokasi penelitian berjumlah 2828 orang, dimana di RW.01 berjumlah 751 orang.

Pemberdayaan sumber daya manusia dapat dijadikan alternatif untuk menurunkan angka kemiskinan, terutama pemberdayaan remaja. Remaja pengangguran pada keluarga miskin diupayakan untuk menghabiskan sebagian besar waktunya dalam kegiatan yang bisa menambah *income* keluarga, dan sektor-sektor informal maupun hal lain, untuk itu potensi dan kemampuan yang dimiliki pemuda merupakan hal yang tidak dapat diabaikan sehingga perlu upaya-upaya pemberdayaan terhadap kelompok remaja pengangguran pada keluarga miskin. Dalam kaitan ini, pemerintah mempresentasikan dalam bentuk proyek P2KP "hanya" memfasilitasi proses dalam bentuk bantuan teknik dari konsultan, oleh karena itu perlu adanya pengentasan kemiskinan melalui kegiatan pendidikan dan latihan.

Pendidikan nasional merupakan salah satu aspek pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia. Pendidikan Nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan pada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang diatur dalam satu sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional sebagai satu dari keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya diarahkan untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia, dalam pelaksanaannya diatur dalam Undang Undang Nomor 20 tahun 2003, menegaskan sebagai berikut :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (Sistem Pendidikan Nasional Bab II pasal 3, 2003 : 6-7).

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa pendidikan nasional diarahkan untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sistem pendidikan nasional berupaya menjadi tatanan penyelenggaraan pendidikan nasional agar seluruh warga negara memiliki pengetahuan, kemampuan dan keterampilan sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang diperlukan bagi peranannya di masa yang akan datang. Dapat diungkapkan bahwa pendidikan menjadi salah satu sarana yang sangat penting dalam menciptakan kualitas manusia Indonesia yang mandiri, maju, dan berpikiran modern atas dasar Pancasila sehingga dapat mensejajarkan dirinya dengan bangsa lain di dunia.

Pemerintah Indonesia mengatur pelaksanaan pendidikan melalui Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 Bab VI pasal 13 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa : “jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya”. (UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003 : 6).

Dapat diungkapkan bahwa pendidikan nasional diselenggarakan melalui jalur pendidikan persekolahan, pendidikan luar sekolah, dan pendidikan keluarga. Jalur-jalur pendidikan ini diharapkan dapat menjadikan sistem pendidikan nasional semakin mantap dalam meletakkan dasar penyelenggaraan pendidikan.

Pendidikan luar sekolah sebagai salah satu jalur pendidikan nasional, diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan sekolah dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Pendidikan nasional terus ditingkatkan kualitasnya agar terwujud sumber daya manusia yang dapat berperan secara aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan. Namun kini muncul berbagai indikator yang menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia belum meningkat secara signifikan. Dari dalam negeri diketahui bahwa kualitas sumber daya manusia relatif rendah dan tidak mengalami peningkatan yang berarti. Dari kalangan dunia usaha dan industri muncul keluhan bahwa lulusan yang memasuki dunia kerja belum memiliki kesiapan kerja yang baik. Selain itu, ketidakpuasan berjenjangpun terjadi. Kalangan SLTP merasa bekal siswa yang lulus SD kurang baik untuk memasuki SLTP, kalangan SLTA merasa bekal siswa yang lulus SLTP tidak siap mengikuti pelatihan di SLTA. Demikian pula di kalangan perguruan tinggi merasa bekal siswa lulusan SLTA belum cukup untuk mengikuti perkuliahan. Dalam kondisi lain juga muncul gejala bahwa siswa lulusan SLTP dan SLTA yang menjadi masalah pedesaan. Mereka sulit memperoleh pekerjaan karena tidak memiliki keterampilan dan keahlian yang baik. Sementara itu mau membantu orangtuanya sebagai petani atau pedagang di pasar merasa malu.

Studi Blazely dkk. (1997) dalam Tim BBE Depdiknas (2001 : 1) melaporkan bahwa pelatihan di sekolah cenderung sangat teoretik dan tidak terkait dengan lingkungan di mana anak berada. Akibatnya peserta didik tidak

mampu menerapkan apa yang dipelajari sekolah guna memecahkan masalah kehidupan yang dihadapi dalam kehidupan keseharian. Pendidikan seakan mencerabut anak didik di lingkungannya, sehingga menjadi asing di masyarakatnya sendiri.

Kini dalam memasuki era globalisasi abad ke 21, dunia pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan yang sangat besar. Pertama, sebagai akibat dari krisis ekonomi, dunia ekonomi dituntut agar mampu mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. Kedua, untuk mengantisipasi era globalisasi, dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan sehingga mampu bersaing dalam pasar global. Ketiga, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian Sistem Pendidikan Nasional sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong partisipasi masyarakat.

Seorang pakar pendidikan luar sekolah, Ivan Illich (1972) dalam Djudju Sudjana (2000 : 83-84) menggambarkan bahwa sekolah memonopoli pendidikan dan lebih menitikberatkan produk lulusan yang hanya didasarkan atas hasil penilaian dengan menggunakan angka-angka dan ijazah. Sekolah telah mengaburkan makna belajar dan mengajar, jenjang pendidikan dan tingkat kemampuan, pemilikan ijazah dan kemampuan lulusan untuk berprestasi dan berinovasi. Proses pendidikan didominasi oleh guru yang cenderung merampas harga diri peserta didik. Proses yang demikian pada dasarnya mengakibatkan

lemahnya ketahanan pribadi peserta didik, kurangnya sikap kreatif, dan rasa ketidakbebasan untuk mengembangkan kemampuan sesuai dengan potensi yang mereka miliki.

Illich menyarankan untuk mengadakan revolusi belajar dalam masyarakat untuk mendorong perubahan budaya. Ia menyatakan bahwa upaya untuk mengadakan perubahan yang tambal sulam terhadap komponen dan proses belajar dalam pendidikan sekolah yang ada sekarang ini tidak akan menjamin tumbuhnya masyarakat baru yang dapat memecahkan dengan segera masalah-masalah yang dihadapinya. Untuk mengadakan revolusi belajar itu *Illich* menganjurkan perubahan secara menyeluruh dalam sistem pendidikan yang ada sekarang dengan menyelenggarakan jaringan-jaringan belajar (*learning webs*) di masyarakat. Program jaringan belajar ini mencakup pertukaran keterampilan dan keahlian, dan mempertemukan peserta didik yang memiliki kebutuhan belajar dengan sumber belajar yang tepat untuk melayaninya. Salah satu program pendidikan luar sekolah yang diintegrasikan dengan pendidikan sekolah atau secara utuh program pendidikan luar sekolah saja yang saat ini sedang dikembangkan adalah pendidikan keterampilan hidup (*life skills*).

Bertitik tolak dari masalah tersebut di atas, kiranya perlu dilakukan konsolidasi, agar pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan hidup (*life skills*). Pendidikan keterampilan hidup (*life skills*) lebih luas dari sekedar keterampilan bekerja, apalagi sekedar keterampilan manual. Pendidikan keterampilan hidup (*life skills*) merupakan konsep pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki keberanian dan kemauan

menghadapi masalah hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara kreatif menemukan solusi serta mampu mengatasinya. Artinya peserta didik yang telah mengikuti pendidikan keterampilan hidup (*life skills*) memiliki keterampilan tertentu yang dapat digunakan sebagai keahlian untuk meningkatkan pendapatan ekonomi kehidupannya sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, dan sumber daya yang tersedia di lingkungannya. Dengan kata lain pendidikan keterampilan hidup (*life skills*) adalah program pendidikan yang dapat mensinergikan berbagai matapelajaran menjadi kecakapan hidup, yang diperlukan seseorang, di manapun ia berada, bekerja atau tidak bekerja, apapun profesinya. Dengan bekal keterampilan hidup tersebut diharapkan para lulusan akan mampu memecahkan problema kehidupan yang dihadapi, termasuk mencari atau menciptakan pekerjaan bagi mereka yang tidak melanjutkan.

Untuk menjawab tantangan tersebut di atas, Departemen Pendidikan Nasional telah menetapkan berbagai kebijakan dan upaya antara lain dengan mengusahakan perluasan akses terhadap pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta mengembangkan manajemen pendidikan yang berbasis sekolah (*school based management*) dan masyarakat (*community based management*), sejalan dengan era desentralisasi pendidikan. Khusus, berkenaan dengan kualitas dan relevansi, di samping mengembangkan kurikulum pendidikan yang berbasis kompetensi, juga mengarahkan sistem pendidikan di berbagai jalur, jenis dan jenjang “pendidikan pada kecakapan atau keterampilan hidup” melalui pendekatan “*Broad-Based Education*” atau pendidikan berbasis kepada kebutuhan masyarakat luas.

Pelaksanaan program pendidikan keterampilan hidup (*life skills*) dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa tidak semua anak usia pendidikan dasar masuk sekolah dan/atau dapat menyelesaikan pendidikannya (putus sekolah). Pada tahun 2000 tercatat sekitar 6 juta anak usia pendidikan dasar yang tidak bersekolah. Penduduk buta aksara usia 10 tahun ke atas masih tercatat sekitar 5,9 juta orang. Dalam pada itu Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi hanya sebesar 11,6 %, berarti 80% dari anak usia 19-24 tahun berada di luar sistem persekolahan dan kelompok inilah yang sebagian harus dilayani melalui jalur pendidikan luar sekolah. Di samping itu, struktur tenaga kerja Indonesia 63,5 % hanya berpendidikan SD ke bawah, dan jumlah penduduk miskin tercatat 37,5 juta orang (SUSENAS 2000) serta tiap tahun terjadi penambahan angka angkatan kerja baru lebih dari 2 juta orang dan yang terserap di lapangan kerja, baik sektor formal maupun informal rata-rata hanya sekitar 20% (Depdiknas, 2002 : 2). Rendahnya daya serap tersebut bukan semata-mata karena sempitnya lapangan kerja akan tetapi kompetensi atau keterampilan yang diinginkan oleh lembaga penerima kerja tidak terpenuhi oleh sebagian besar pencari kerja.

Secara empirik, program pelatihan keterampilan hidup (*life skill*) yang saat ini dikembangkan oleh pemerintah belum menunjukkan upaya kearah pemberdayaan warga belajar yang memungkinkan mereka mampu mandiri dalam belajar, bekerja dan berusaha. Latar belakang yang menyebabkannya adalah konsep normatif pengembangan program pelatihan keterampilan hidup (*life skill*) untuk mengembangkan kemandirian remaja belum diaktualisasikan secara sempurna. Misalnya: menyangkut kegiatan pelatihan berpusat pada warga belajar

(student centered), yang mengutamakan aktivitas warga belajar sebagai peserta pelatihan dengan cara belajar siswa aktif, dan memberikan kesempatan kepada warga belajar untuk mengarahkan sendiri aktivitas belajarnya, serta pemahaman dan pengembangan konsep budaya belajar dan bekerja, yang seharusnya menyatu dalam kurikulum dan proses pembelajaran.

Bentuk-bentuk pelatihan yang selama ini diberikan kepada remaja belum mencapai tujuan yang diharapkan. Pelatihan-pelatihan yang diberikan cenderung lebih bersifat teoritis dan tidak bersifat komprehensif terutama minat dan bakat remaja itu sendiri. . Sehingga remaja kurang berperan aktif dalam peningkatan kompetensi dirinya. Pelatihan-pelatihan yang diberikan selama ini kurang memberi penekanan pada aspek kemandirian remaja. Sehingga walaupun remaja tersebut sudah melakukan pelatihan tetapi remaja tersebut tidak mampu menciptakan wirausaha dan remaja masih sangat tergantung pada ketersediaan lapangan kerja tanpa mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Keadaan demikian menyebabkan remaja tidak mampu berbuat banyak dalam peran peningkatan pendapatan keluarga.

Berdasarkan hal tersebut di atas perlu dirancang suatu model pelatihan kecakapan hidup pada remaja dalam upaya menciptakan kemandirian remaja yang pada akhirnya dapat membantu pengentasan kemiskinan.

B. Identifikasi Masalah

Sampai saat ini masih banyak remaja yang tidak mempunyai keterampilan yang memadai sehingga tidak terserap oleh lapangan kerja dan akan meningkatkan jumlah penduduk yang menganggur. Tingginya angka

pengangguran akan memperberat masalah kemiskinan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena remaja yang menganggur akan menjadi beban dalam keluarga.

Beberapa pelatihan yang dilakukan belum lagi mampu menciptakan remaja yang mandiri dan tenaga yang terampil yang mampu menciptakan lapangan kerja baru atau dapat terserap oleh lapangan kerja yang sudah ada. Sempitnya lapangan kerja dan tuntutan dari lapangan kerja yang membutuhkan tenaga kerja siap pakai, mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai, sikap dan motivasi serta etos kerja yang baik, bahkan tenaga kerja yang mempunyai jiwa wirausaha (*entrepreneur*), menyebabkan timbulnya pemikiran untuk membuat suatu model pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup (*life skills*).

Pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) bertujuan untuk membekali seseorang pengetahuan, keterampilan dan kemampuan fungsional praktis serta perubahan sikap untuk bekerja dan berusaha mandiri, membuka lapangan kerja dan lapangan usaha serta memanfaatkan peluang yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan kualitas kesejahteraannya. Pendidikan keterampilan hidup dirancang untuk membimbing, melatih, dan membelajarkan warga belajar agar memiliki bekal dalam menghadapi masa depannya dengan memanfaatkan peluang dan tantangan yang ada.

Persyaratan dasar jenis pendidikan keterampilan hidup (*life skills*) jalur pendidikan luar sekolah menurut Ditjen PLSP (2002 : 6) adalah sebagai berikut :

1. Keterampilan hidup dikembangkan berdasarkan minat dan bakat kelompok sasaran,
2. Terkait dengan karakteristik potensi wilayah setempat misalnya sumber daya alam, ekonomi, pariwisata, dan sosial budaya,

3. Dapat dikembangkan secara nyata sebagai dasar penguatan sektor usaha kecil atau industri rumah (*home industri*), pelatihan berorientasi pada peningkatan kompetensi keterampilan untuk berusaha dan bekerja,
4. Lebih bersifat aplikatif, dan operasional,
5. Jenis keterampilan ditetapkan oleh program bersama-sama dengan warga belajar, mitra kerja terkait, tokoh masyarakat, dan lainnya yang berhubungan dengan program keterampilan hidup.

Dengan demikian pendidikan keterampilan hidup (*life skills*) yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan luar sekolah diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik yang memiliki keterampilan kerja yang mencakup : pemilihan kerja, perencanaan kerja, persiapan keterampilan kerja, latihan keterampilan, penguasaan kompetensi, pemilikan suatu profesi, kesadaran proses pekerjaan, dan keterampilan untuk menghasilkan suatu produk yang dapat dipasarkan.

Untuk dapat mewujudkan pendidikan keterampilan hidup (*life skills*), maka perlu diterapkan prinsip pendidikan berbasis luas (*broad based education*) yang tidak hanya berorientasi pada bidang akademik semata atau vokasional semata, tetapi juga memberikan bekal *learning how to learn* sekaligus *learning to unlearn*, tidak hanya belajar teori, tetapi juga mempraktekkannya untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Dengan demikian secara umum pendidikan keterampilan hidup (*life skills*) bertujuan untuk mengembalikan pendidikan pada fitrahnya, yaitu mengembangkan potensi peserta didik untuk menghadapi peranannya di masa datang. Secara khusus pendidikan keterampilan hidup (*life skills*) bertujuan untuk : 1) mengaktualisasikan potensi peserta didik sehingga dapat digunakan untuk memecahkan problema yang dihadapi; 2) memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan luar sekolah untuk

mengembangkan pelatihan yang fleksibel, sesuai dengan prinsip pendidikan berbasis luas (*broad-based education*), dan 3) mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya di lingkungan masyarakat, dengan memberi peluang pemanfaatan sumberdaya yang ada di masyarakat, sesuai dengan prinsip manajemen berbasis masyarakat (*community based management*).

Pendidikan keterampilan hidup (*life skills*) yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan luar sekolah bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga belajar di bidang tertentu sesuai dengan bakat dan minatnya sehingga mereka memiliki bekal kemampuan untuk bekerja yang dapat mendatangkan penghasilan yang layak guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Program pendidikan keterampilan hidup (*life skills*) bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik agar : 1) memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan dalam memasuki dunia kerja baik bekerja secara mandiri (wirausaha) dan/atau bekerja pada suatu perusahaan produksi/jasa dengan penghasilan yang semakin layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, 2) memiliki motivasi dan etos kerja yang tinggi serta dapat menghasilkan karya-karya yang unggul dan mampu bersaing di pasar global, 3) memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya pendidikan untuk dirinya sendiri maupun untuk anggota keluarganya, 4) memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dalam rangka mewujudkan keadilan pendidikan di setiap lapisan masyarakat.

Dengan demikian pendidikan keterampilan hidup (*life skills*) bermanfaat bagi peserta didik adalah sebagai bekal dalam menghadapi dan memecahkan

problema hidup dan kehidupan, baik sebagai pribadi yang mandiri, warga masyarakat dan warga negara. Jika hal itu berhasil, maka faktor ketergantungan (*dependency factor*) akibat banyaknya pengangguran dapat diturunkan, yang berarti produktivitas nasional akan meningkat. Sebagai suatu konsep, pendidikan keterampilan hidup tentu terbuka dan memang akan terus berkembang.

Pendidikan luar sekolah merupakan sisi strategis dalam dunia pendidikan dan dunia kerja. Sisi strategis tersebut perlu didukung oleh model penyelenggaraan pendidikan luar sekolah yang mampu menghasilkan tenaga kerja terampil dan mandiri serta mampu bersaing pada era global. Salah satu model yang berkembang dalam menjawab tantangan itu adalah program pendidikan keterampilan hidup (*life skill*). Keterampilan hidup adalah konsep yang bertujuan memberi bekal pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan fungsional praktis, serta perubahan sikap dan perilaku pada seseorang untuk bekerja dan berusaha mandiri, sehingga dapat membuka lapangan kerja dan lapangan usaha serta memanfaatkan peluang yang dimilikinya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Konsep keterampilan hidup memiliki cakupan yang luas, berinteraksi antara pengetahuan dan keterampilan yang diyakini sebagai unsur penting untuk hidup mandiri. Pendidikan luar sekolah melalui lembaga pelatihan telah secara nyata mengembangkan program keterampilan hidup melalui berbagai satuan program. Namun demikian program pelatihan keterampilan hidup sangat terbatas, baik kuantitas maupun kualitasnya. Kendala yang masih banyak ditemui adalah relevansi bidang keahlian yang dikembangkan dalam program pelatihan dengan kebutuhan tenaga kerja di lapangan masih rendah, kontribusi pihak-pihak yang

membutuhkan tenaga kerja masih minim, kemampuan dan kesiapan pengelola pemerintah sebagai institusi penyelenggara yang mengembangkan pelatihan masih sangat minim termasuk dalam pengembangan kurikulum, pengelolaan pembelajaran, strategi pembelajaran, penyiapan peserta pelatihan/tutor (sumber belajar), sarana prasarana dan warga belajar.

Angkatan kerja yang belum mendapatkan kesempatan bekerja atau usaha mandiri karena berbagai alasan sebagai fokus penelitian ini. Lebih khusus lagi difokuskan pada angkatan kerja yang berusia antara 17 sampai 25 tahun yang belum memiliki keterampilan sesuai minat, bakat dan kemampuannya.

Selama ini bentuk-bentuk pelatihan yang dilakukan cenderung tidak melihat minat dan bakat peserta pelatihan dan juga cenderung mengabaikan aspek sikap dan pembinaan motivasi dan etos kerja. Dengan demikian perlu dirancang suatu model pelatihan kecakapan hidup untuk kemandirian dengan memperhatikan aspek sikap, motivasi, etos kerja dan jiwa entrepreneur yang mengarah kepada sifat mandiri.

Fokus terhadap pengentasan remaja masyarakat miskin perkotaan tersebut didorong oleh beberapa keadaan terutama situasi ekonomi yang global dan pemenuhan kebutuhan SDM untuk pembangunan. Kebutuhan untuk memperoleh keterampilan yang mendesak bagi kalangan remaja pengangguran adalah cepat dapat pekerjaan atau mandiri. Oleh karena itu, diperlukan suatu terobosan pengembangan model pelatihan keterampilan hidup yang efisien dan efektif agar angkatan kerja tersebut mendapatkan pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal hidup mereka.

C. Rumusan Masalah

Pengembangan model pelatihan kecakapan hidup untuk kemandirian kelompok remaja mempunyai sasaran membantu program pengentasan kemiskinan, dengan mendayagunakan remaja dalam upaya peningkatan pendapatan keluarga. Model pelatihan merupakan pengembangan dari suatu model pelatihan kepada remaja dalam konteks pengaplikasian ilmu pendidikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam penelitian ini yang menjadi pokok masalah adalah: “Bagaimanakah pengembangan model pelatihan kecakapan hidup yang dapat meningkatkan kemandirian remaja dalam membantu meningkatkan pendapatan keluarga. Secara spesifik rumusan masalah ini ditetapkan dalam bentuk kalimat pertanyaan penelitin sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kondisi objektivitas pelatihan kelompok remaja yang berasal dari keluarga miskin di RW.01 Kelurahan Cigadung Kota Bandung?
2. Bagaimanakah model konseptual pelatihan kecakapan hidup untuk kemandirian kelompok remaja dari keluarga miskin di RW.01 Kelurahan Cigadung Kota Bandung ?
3. Bagaimanakah implementasi model konseptual pelatihan kecakapan hidup untuk kemandirian kelompok remaja dari keluarga miskin di RW.01 Kelurahan Cigadung Kota Bandung?
4. Bagaimanakah efektifitas model pelatihan kecakapan hidup untuk kemandirian kelompok remaja dari keluarga miskin di RW.01 Kelurahan Cigadung Kota Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah, penelitian ini secara umum memiliki tujuan untuk mengembangkan model pelatihan kecakapan hidup untuk kemandirian kelompok remaja dari keluarga miskin di RW.01 Kelurahan Cigadung Kota Bandung. Sedangkan yang menjadi tujuan khususnya adalah untuk:

1. Menggambarkan kondisi objektivitas pelatihan kelompok remaja yang berasal dari keluarga miskin di RW.01 Kelurahan Cigadung Kota Bandung.
2. Menyusun model konseptual pelatihan kecakapan hidup untuk kemandirian kelompok remaja dari keluarga miskin di RW.01 Kelurahan Cigadung Kota Bandung.
3. Mengetahui implementasi pengembangan model konseptual pelatihan kecakapan hidup untuk kemandirian kelompok remaja dari keluarga miskin di RW.01 Kelurahan Cigadung Kota Bandung.
4. Mengetahui efektifitas pengembangan model pelatihan kecakapan hidup untuk kemandirian kelompok remaja dari keluarga miskin di RW.01 Kelurahan Cigadung Kota Bandung.

E. Definisi Operasional

Untuk memberikan kejelasan arah dan memudahkan dalam pelaksanaan penelitian perlu diberikan definisi operasional.

1. Model pelatihan kecakapan hidup adalah suatu pola atau bentuk dalam upaya pemberdayaan kelompok remaja pada keluarga miskin dengan latar belakang para kelompok remaja pengangguran, diharapkan mampu untuk berperan aktif

dalam meningkatkan kompetensi dirinya untuk dapat membantu meningkatkan pendapatan keluarga maupun membuka peluang lapangan pekerjaan, yang lebih menekankan pada upaya peningkatan diri.

2. Kelompok remaja yang dimaksud adalah sekelompok remaja berusia 17 – 25 tahun yang menganggur dari kalangan keluarga miskin yang terlibat dalam proses pelatihan kecakapan hidup di wilayah RW 1 kelurahan Cigadung kota Bandung dalam wadah “Insani”. Dimana hal ini merupakan wadah bagi pembinaan dan pengembangan remaja dalam berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan baik bagi diri sendiri maupun keluarga, yang beranggotakan dengan jumlah 10 orang.
3. Keluarga miskin adalah merupakan bagian dari kelompok remaja dimana remaja berasal dari keluarga yang memiliki keterbatasan baik dari segi ekonomi, sosial dan lain-lainnya. Sehingga memerlukan pertolongan dalam meningkatkan taraf hidup kearah yang lebih baik dari keadaan sekarang. Komunitas ini adalah masyarakat/keluarga miskin yang ada dalam wilayah RW 1 Kelurahan Cigadung Kota Bandung.
4. Kemandirian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku yang diarahkan pada diri sendiri dengan ciri-ciri etos kerja yang tinggi, disiplin, memiliki keterampilan tertentu untuk dijadikan mata pencaharian, memiliki penghasilan yang lebih baik dari sebelumnya, memiliki pengetahuan.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

- a. Memberikan sumbangan bagi pengembangan keilmuan kajian pendidikan luar sekolah, khususnya pengembangan model pendidikan luar sekolah yang berperan sebagai pelengkap pendidikan sekolah (*supplementary model*) yang difokuskan untuk menangani warga belajar kelompok remaja yang berasal dari keluarga miskin yang sampai saat ini belum banyak dikaji oleh jalur subsistem pendidikan luar sekolah.
- b. Memberikan sumbangan model pembelajaran yang dapat dipergunakan untuk pemberdayaan warga belajar kelompok remaja yang berasal dari keluarga miskin melalui pelatihan kecakapan hidup.
- c. Memperkaya PLS yang memerlukan kekayaan model pembelajaran yang aplikatif agar terbentuk warga belajar yang handal dan mantap.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat sebagai berikut :

a. Bagi Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah

- 1) Dapat menjadi acuan dan bahan pertimbangan dalam merancang kegiatan pelatihan dan keterampilan terutama kepada remaja.
- 2) Dapat memotivasi agar lembaga-lembaga maupun institusi pendidikan luar sekolah dalam menyusun program pelatihan berusaha mengembangkan

pendidikan kecakapan hidup yang akan menghasilkan peserta pelatihan menjadi mandiri

b. Bagi Wadah Insani Kelompok Remaja

- 1) Penelitian ini dapat menjadi landasan penyelenggaraan model dan proses pelatihan kecakapan hidup saat ini.
- 2) Penelitian ini dapat menjadi sarana penyebarluasan penerapan model pada program-program pendidikan luar sekolah lainnya.
- 3) Dalam konteks Pendidikan Luar Sekolah, hasil-hasil penelitian ini dapat menjadi sarana untuk merekomendasikan bahwa perluasan pendidikan luar sekolah tidak hanya diorientasikan pada kelembagaan dalam lingkup pendidikan luar sekolah.

c. Bagi Peneliti Lanjutan

- 1) Bermanfaat sebagai bahan kajian dan memberikan arah bagi pihak lain yang berminat untuk meneliti permasalahan ini secara lebih lanjut.
- 2) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi pihak yang diberikan rekomendasi dalam upaya merespon kebutuhan belajar bagi warga belajar untuk mencapai kemandirian, dengan adanya model yang relatif telah teruji yang disertai pemaparan keunggulan dan kelemahan model.
- 3) Penelitian ini dapat menjadi sumber pengembangan model penelitian yang sama dengan kriteria kemandirian yang berbeda sehingga tercipta model-model pendidikan kecakapan hidup yang aktual dan dapat diterapkan oleh masyarakat.

